

**DINAMIKA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PUBLIK:  
STUDI KASUS PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN  
SUMBAWA**

Meilani Al Rahmatia<sup>1</sup>, Sriyatun<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Teknologi Sumbawa,

<sup>1</sup>melanialrahmatia@gmail.com, <sup>2</sup>sriyatun@uts.ac.id,

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the dynamics of public financial transparency and accountability at the National Narcotics Agency (BNN) of Sumbawa Regency from the perspective of good governance and agency theory. A qualitative approach with case study method was applied. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation with the Expenditure Treasurer and the Revenue Treasurer of BNN Sumbawa Regency, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results show that financial transparency and accountability at BNN Sumbawa Regency have generally been implemented properly. Transparency is realized through periodic financial reporting and the use of digital systems such as SAKTI, SIMPONI, and CMS, while accountability is reflected in the preparation of accountability reports based on Government Accounting Standards (SAP) and state financial regulations. Supporting factors include human resource competence, internal control systems, and digitalization, whereas network disruptions, system errors, and regulatory complexity remain the main obstacles. The study concludes that the implementation of transparency and accountability at BNN Sumbawa Regency has supported the principles of good governance, although improvements in public information disclosure are still needed to strengthen community participation and trust in public financial management.*

*Keywords: transparency, accountability, good governance, agency theory, public finance, BNN sumbawa regency*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transparansi dan akuntabilitas keuangan publik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa

dengan menggunakan perspektif teori *good governance* dan *agency theory*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan BNN Kabupaten Sumbawa, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di BNN Kabupaten Sumbawa secara umum telah berjalan dengan baik. Transparansi diwujudkan melalui pelaporan keuangan berkala dan pemanfaatan sistem digital seperti SAKTI, SIMPONI, dan CMS, sedangkan akuntabilitas diterapkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan regulasi pengelolaan keuangan negara. Faktor pendukung utama meliputi kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan digitalisasi, sedangkan gangguan jaringan, *error* sistem, dan kompleksitas regulasi masih menjadi kendala utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas pada BNN Kabupaten Sumbawa telah mendukung prinsip *good governance*, meskipun masih diperlukan peningkatan keterbukaan informasi publik guna memperkuat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik.

Kata Kunci: transparansi, akuntabilitas, *good governance*, *agency theory*, keuangan publik, BNN kabupaten sumbawa

## **A. Pendahuluan**

Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik merupakan prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam era reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik, masyarakat menuntut pemerintah untuk mampu mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo,

2021). Transparansi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi keuangan pemerintah, sedangkan akuntabilitas menekankan kewajiban instansi publik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program kepada masyarakat serta pihak yang berkepentingan. Penerapan kedua prinsip tersebut menjadi sangat penting karena rendahnya

transparansi dan akuntabilitas dapat memicu penyalahgunaan anggaran, korupsi, lemahnya pengawasan publik, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Jannah & Nurhayati, 2023; Sari et al., 2024).

Dalam konteks pengelolaan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi pemerintah (Bastian, 2021). Pengelolaan keuangan yang transparan memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut penelitian sebelumnya, penerapan transparansi dan akuntabilitas yang baik mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas program pemerintah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Pratama, 2022; Yuliana & Hidayat, 2021).

Perkembangan teknologi informasi turut mendorong transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintah menuju sistem digital yang lebih modern dan terintegrasi. Digitalisasi pengelolaan keuangan melalui aplikasi pemerintahan dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pelaporan, meminimalkan kesalahan manusia (*human error*), serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan publik juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan penerapan *e-government* yang bertujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel (Rahmawati et al., 2023; Saputra & Anwar, 2022).

Salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran negara adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, BNN mengelola anggaran

negara untuk mendukung berbagai program seperti pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan jaringan narkoba. Oleh karena itu, penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada instansi ini menjadi sangat penting guna memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan informasi pada laman resmi Badan Narkotika Nasional, penguatan tata kelola organisasi dan reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas BNN dalam pemberantasan narkoba di Indonesia (BNN RI, 2026).

Pada tingkat daerah, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan nasional terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam pelaksanaan tugasnya, BNN Kabupaten Sumbawa juga dituntut untuk mampu mengelola anggaran

secara profesional, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan informasi pada laman resmi BNN Kabupaten Sumbawa, instansi ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengawasan internal, serta penerapan sistem digital dalam mendukung efektivitas pengelolaan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat (BNN Kabupaten Sumbawa, 2026).

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik pada instansi pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan keuangan sektor publik meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, kompleksitas regulasi, rendahnya keterbukaan informasi publik, hingga kendala teknis pada sistem digital yang digunakan dalam pelaporan keuangan (Putri et al., 2024; Andini & Kurniawan, 2023). Selain itu, masih terdapat instansi pemerintah yang belum optimal dalam memberikan akses informasi keuangan kepada masyarakat sehingga partisipasi publik dalam

pengawasan anggaran belum berjalan secara maksimal.

Penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan publik telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian Hidayat dan Sari (2022) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian lainnya menyebutkan bahwa penerapan sistem digital dan pengawasan internal yang baik mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta meminimalkan potensi penyimpangan anggaran (Wibowo et al., 2023). Lestari dan Hartono (2023) juga menegaskan bahwa implementasi prinsip *good governance* pada instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem informasi keuangan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pemerintah daerah atau organisasi perangkat daerah (OPD), sedangkan penelitian mengenai dinamika transparansi dan akuntabilitas pada lembaga vertikal pemerintah seperti Badan Narkotika Nasional masih

relatif terbatas, khususnya pada tingkat kabupaten.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami secara lebih mendalam bagaimana dinamika transparansi dan akuntabilitas keuangan publik diterapkan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada mekanisme keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui

upaya yang dilakukan instansi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, serta menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi instansi pemerintah dalam memperkuat praktik *good governance*.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika transparansi dan akuntabilitas keuangan publik pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai proses pengelolaan keuangan, mekanisme pertanggungjawaban, sistem pengawasan, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan

prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik.

Metode studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu objek tertentu, yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, kontekstual, dan terperinci mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan perspektif teori *good governance* dan *agency theory* sebagai landasan dalam menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik pada instansi pemerintah (Susanto, 2022).

### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara untuk mendukung pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Selain itu, BNN Kabupaten Sumbawa telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis

digital dan memiliki mekanisme pengawasan internal maupun eksternal yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian dilaksanakan selama periode April hingga Mei 2026 dengan menyesuaikan jadwal observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen yang dibutuhkan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan di BNN Kabupaten Sumbawa, yaitu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Informasi yang dikumpulkan meliputi mekanisme transparansi, bentuk pertanggungjawaban keuangan, sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntabilitas keuangan publik.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa laporan pertanggungjawaban keuangan, laporan kinerja instansi, regulasi pengelolaan keuangan negara, arsip organisasi, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Data sekunder juga diperoleh dari laman resmi BNN Kabupaten Sumbawa (<https://sumbawakab.bnn.go.id/>) dan BNN RI (<https://bnn.go.id/>).

### **4. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini dipilih langsung oleh penelitian, dimana informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan di BNN Kabupaten Sumbawa. Adapun informan utama dalam penelitian ini yaitu Bendahara Pengeluaran Bernama Bapak Sahabuddin, S,E dan Bendahara Penerimaan bernama Bapak Ibnu Prijananda, S.E.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi terstruktur

kepada informan penelitian agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih fleksibel mengenai mekanisme pengelolaan anggaran, proses pelaporan keuangan, pengawasan internal dan eksternal, serta kendala yang dihadapi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan BNN Kabupaten Sumbawa, termasuk penerapan sistem pengendalian internal serta penggunaan aplikasi SAKTI, SIMPONI, dan CMS. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang relevan, seperti laporan pertanggungjawaban keuangan, laporan kinerja instansi, dan peraturan pengelolaan keuangan negara, untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

#### **6. Uji Keabsahan Data**

Untuk memastikan kredibilitas dan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan

membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti memahami hubungan antar data berdasarkan tema seperti transparansi keuangan, akuntabilitas, pengawasan internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kendala pengelolaan keuangan publik. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai dinamika transparansi dan akuntabilitas keuangan publik pada BNN

Kabupaten Sumbawa beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Gambaran Umum Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di BNN Kabupaten Sumbawa**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa merupakan instansi vertikal pemerintah yang memiliki tugas dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dalam menjalankan tugas tersebut, instansi mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, sistem pengelolaan keuangan di BNN Kabupaten Sumbawa telah menggunakan sistem digital berbasis aplikasi seperti SAKTI, SIMPONI, dan CMS yang terintegrasi dengan sistem pemerintah pusat.

Dalam perspektif teori *good governance*, transparansi dan

akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik (Jannah & Nurhayati, 2023). Sementara itu, *agency theory* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai *agent* memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran kepada masyarakat sebagai *principal* melalui mekanisme pengawasan dan pelaporan yang jelas (Pratama, 2022; Susanto, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital, pengawasan internal, dan pelaporan berkala di BNN Kabupaten Sumbawa menjadi bentuk implementasi prinsip *good governance* sekaligus mekanisme pengendalian dalam perspektif *agency theory*. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati et al. (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola dan memperkuat pengawasan

terhadap penggunaan anggaran publik.

## **2. Transparansi Keuangan Publik**

Berdasarkan hasil wawancara, transparansi keuangan di BNN Kabupaten Sumbawa telah diterapkan melalui mekanisme pelaporan berkala dan pemanfaatan media digital. Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan melalui laman resmi BNN Kabupaten Sumbawa serta layanan publik lainnya. Selain itu, Bendahara Penerimaan menyampaikan bahwa laporan penerimaan negara wajib disampaikan setiap bulan kepada KPPN dan dilakukan monitoring evaluasi secara internal melalui laporan semester.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat masih dilakukan secara bertahap dan berjenjang melalui institusi terkait. Informasi keuangan tidak dipublikasikan secara langsung dan menyeluruh kepada masyarakat, melainkan melalui proses pelaporan internal terlebih dahulu kepada BNN Provinsi dan BNN RI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

transparansi yang diterapkan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis partisipasi publik.

Dalam teori *good governance*, transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik. Semakin terbuka suatu instansi pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (Yuliana & Hidayat, 2021). Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat dan Sari (2022) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Selain itu, penerapan sistem digital seperti SAKTI, SIMPONI, dan CMS dinilai sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan keterbukaan pengelolaan anggaran. Kedua informan menyatakan bahwa penggunaan teknologi digital mempermudah proses pelaporan, mempercepat akses data, dan meminimalkan risiko kesalahan manusia (*human error*). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Saputra dan Anwar (2022) yang menyebutkan

bahwa implementasi *e-government* mampu meningkatkan transparansi, efektivitas pelayanan publik, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Dari perspektif *agency theory*, penggunaan sistem digital merupakan bentuk pengendalian untuk mengurangi potensi *asymmetric information* antara pemerintah sebagai pengelola anggaran dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi lebih mudah dilakukan sehingga risiko penyalahgunaan keuangan dapat ditekan (Susanto, 2022).

### **3. Akuntabilitas Keuangan Publik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan di BNN Kabupaten Sumbawa diwujudkan melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan laporan keuangan berkala yang dilaporkan kepada KPPN, KPA, PPK, dan BNN RI. Dalam penyusunan laporan keuangan, instansi menggunakan aplikasi SAKTI yang telah terintegrasi dengan sistem pelaporan pemerintah pusat.

Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan Bendahara Penerimaan menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan juga mengacu pada berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penerapan SAP merupakan kerangka acuan utama dalam menyusun laporan keuangan pemerintah agar memenuhi prinsip relevansi, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Halim & Kusufi, 2022).

Dalam perspektif teori *good governance*, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan penggunaan anggaran kepada publik secara transparan dan terukur. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Jannah & Nurhayati, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas di BNN

Kabupaten Sumbawa telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari ketepatan waktu pelaporan, minimnya temuan audit, serta adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang rutin dilakukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wibowo et al. (2023) yang menyatakan bahwa pengawasan dan sistem pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan sektor publik.

Dalam perspektif *agency theory*, akuntabilitas berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban *agent* kepada *principal*. Pemerintah sebagai pengelola anggaran memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang sistematis dan berbasis regulasi menjadi instrumen penting dalam mengurangi potensi penyimpangan anggaran (Pratama, 2022; Susanto, 2022).

#### **4. Pengendalian Internal dan Pengawasan**

Berdasarkan hasil wawancara, sistem pengendalian internal di BNN

Kabupaten Sumbawa dilakukan melalui pemeriksaan berlapis, audit rutin, dan pembentukan Unit Kepatuhan Internal. Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa instansi telah membentuk Tim Pengawas Internal melalui Keputusan Kepala BNN Kabupaten Sumbawa tentang Unit Kepatuhan Internal. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dilakukan oleh berbagai pihak seperti KPA, KPPN, Inspektorat BNN, BPK, KPK, dan aparat pengawas lainnya. Seluruh laporan pertanggungjawaban juga harus diperiksa dan ditandatangani oleh pejabat terkait sebelum disampaikan kepada KPPN.

Dalam teori *agency theory*, sistem pengawasan diperlukan untuk meminimalkan konflik kepentingan dan potensi penyimpangan antara *principal* dan *agent*. Pengawasan internal dan eksternal menjadi instrumen kontrol untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan sesuai aturan dan tujuan organisasi (Pratama, 2022).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang diterapkan di BNN Kabupaten Sumbawa dinilai cukup efektif karena beberapa kali pemeriksaan audit tidak menemukan

penyimpangan yang signifikan. Digitalisasi sistem keuangan juga membantu menutup celah penyalahgunaan anggaran karena seluruh transaksi dapat dipantau secara langsung melalui sistem. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri et al. (2024) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu memperkuat pengawasan dan mengurangi risiko kebocoran anggaran pada sektor publik.

## **5. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan di BNN Kabupaten Sumbawa tergolong cukup baik. Kedua informan menyatakan bahwa pejabat perbendaharaan memiliki pengalaman yang memadai dan telah memiliki sertifikasi kompetensi nasional di bidang pengelolaan keuangan negara. Selain itu, instansi rutin melaksanakan pelatihan, pembinaan, dan kegiatan *refreshment* untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam pengelolaan keuangan.

Menurut teori *good governance*, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam

menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional. Aparatur yang kompeten akan lebih mampu memahami regulasi, menjalankan prosedur administrasi, serta meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan anggaran (Andini & Kurniawan, 2023; Lestari & Hartono, 2023). Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kompetensi SDM menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam keberhasilan penerapan transparansi dan akuntabilitas di BNN Kabupaten Sumbawa.

## **6. Kendala dan Hambatan**

Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama dalam pengelolaan keuangan lebih banyak berasal dari aspek teknis seperti gangguan jaringan dan *error system* pada aplikasi digital. Kondisi ini sering terjadi terutama pada akhir periode pelaporan ketika beban sistem menjadi sangat tinggi. Selain itu, kompleksitas regulasi dan persyaratan administrasi juga dianggap menjadi tantangan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, terutama karena adanya perubahan

regulasi yang cukup dinamis dari pemerintah pusat.

Walaupun demikian, kedua informan menilai bahwa regulasi pemerintah tetap memberikan manfaat karena menjadi pedoman yang jelas dalam pengelolaan anggaran. Dalam teori birokrasi Weber, aturan dan prosedur memang diperlukan untuk menciptakan ketertiban administrasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi, birokrasi yang terlalu kompleks juga dapat menghambat efektivitas organisasi (Bastian, 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri et al. (2024) yang menyatakan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan keuangan berbasis digital di sektor publik adalah stabilitas sistem teknologi dan tingginya kompleksitas administrasi.

## **7. Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**

BNN Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, seperti pelaksanaan rapat evaluasi rutin, penguatan pengawasan internal, digitalisasi sistem pelayanan, serta pembangunan budaya antikorupsi

melalui program Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Selain itu, perubahan sistem pelayanan dari manual menjadi berbasis digital juga menjadi bentuk inovasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik. Menurut teori *good governance*, inovasi pelayanan publik dan digitalisasi merupakan strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Rahmawati et al., 2023; Lestari & Hartono, 2023).

Dari perspektif *agency theory*, inovasi digital dan penguatan pengawasan merupakan bentuk mekanisme kontrol yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap berada pada jalur yang sesuai dengan kepentingan publik (Sari et al., 2024). Dengan demikian, penerapan transparansi dan akuntabilitas di BNN Kabupaten Sumbawa menunjukkan adanya upaya nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika transparansi dan akuntabilitas keuangan publik pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan di instansi tersebut secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini terlihat dari penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital melalui aplikasi SAKTI, SIMPONI, dan CMS yang membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, ketepatan pelaporan, serta mempermudah proses pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Selain itu, laporan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara berkala sesuai dengan regulasi pemerintah yang berlaku dan diawasi oleh pihak internal maupun eksternal seperti KPPN, Inspektorat BNN, dan BPK.

Berdasarkan perspektif teori *good governance*, penerapan transparansi dan akuntabilitas di BNN Kabupaten Sumbawa telah mencerminkan adanya upaya untuk

mewujudkan prinsip keterbukaan, pengawasan, efektivitas, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik. Sementara itu, berdasarkan perspektif *agency theory*, mekanisme pengawasan, pelaporan, dan digitalisasi sistem keuangan berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, serta pengendalian internal menjadi faktor pendukung utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di BNN Kabupaten Sumbawa. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, terutama berkaitan dengan gangguan jaringan, *error system*, serta kompleksitas regulasi administrasi yang cukup ketat dalam proses pelaporan keuangan. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat masih belum sepenuhnya dilakukan secara langsung dan menyeluruh sehingga partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan belum optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, yaitu: (1) BNN Kabupaten Sumbawa perlu meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui publikasi ringkasan laporan keuangan pada laman resmi instansi; (2) penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin di bidang akuntansi sektor publik dan teknologi informasi keuangan; (3) peningkatan stabilitas sistem digital untuk meminimalkan gangguan jaringan dan *error system*; serta (4) penyederhanaan prosedur administrasi yang tidak mengurangi prinsip akuntabilitas. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa instansi vertikal pemerintah sehingga dapat dilakukan analisis perbandingan terhadap dinamika transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andini, R., & Kurniawan, D. (2023). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. *Jurnal COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(2), 4521–4534. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/15867>
- Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa. (2026). *Informasi pelayanan dan kegiatan instansi*. <https://sumbawakab.bnn.go.id/>
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2026). *Profil dan tata kelola organisasi*. <https://bnn.go.id/>
- Bastian, I. (2021). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar* (Edisi ke-4). Erlangga.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2022). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi* (Edisi ke-3). Salemba Empat.
- Hidayat, A., & Sari, P. (2022). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Governance dan Public Administration (JOGAPA)*, 5(2), 88–102. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jogapa/article/view/3316>
- Jannah, N., & Nurhayati, S. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good governance*. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 25–

37. <https://ejurnal.polnes.ac.id/index.php/eksis/article/view/1871>
- Lestari, N. P., & Hartono, B. (2023). Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(2), 320–335.  
<https://doi.org/10.21776/ub.jam.al.2023.14.2.23>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi ke-5). Andi Offset.
- Pratama, R. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik. *Amanah: Jurnal Amanah Akuntansi*, 6(1), 12–24.  
<https://journal.uwais.ac.id/index.php/amanah/article/view/10>
- Putri, L., Rahman, A., & Dewi, S. (2024). Tantangan pengelolaan keuangan publik berbasis digital. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 4(1), 215–228.  
<https://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/10639>
- Rahmawati, D., Fitriani, E., & Saputri, M. (2023). Digitalisasi keuangan dan reformasi birokrasi pemerintah. *West Science Journal of Business and Management*, 1(3), 198–210.  
<https://wnj.westsciences.com/index.php/jbmws/article/view/1160>
- Saputra, F., & Anwar, H. (2022). Implementasi *e-government* dalam tata kelola pemerintahan. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 88–100.  
<https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/article/view/4228>
- Sari, M., Wahyudi, T., & Lestari, A. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi transparansi keuangan publik pada instansi pemerintah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara*, 6(1), 45–62.  
<https://doi.org/10.33105/jakn.v6i1.2024>
- Susanto, A. (2022). Teori agensi dalam pengelolaan keuangan sektor publik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 37(3),

245–260.

<https://doi.org/10.22146/jebi.20>

22.37.3.245

Wibowo, Y., Siregar, T., & Lestari, N.

(2023). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan. *JIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 145–160.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/9992>

Yuliana, R., & Hidayat, M. (2021).

Transparansi sektor publik dan kepercayaan masyarakat. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)*, 25(2), 110–125.

<https://doi.org/10.22146/jkap.8318>.